

## Banyak Kendala Atasi Banjir di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengakui terdapat sejumlah kendala dalam mengantisipasi bencana banjir yang diperkirakan akan terjadi pada awal 2012. Kendala itu di antaranya molornya proyek pengerukan 10 sungai dan minimnya anggaran untuk pemeliharaan waduk dan sungai di APBD. Gubernur mengatakan proyek pengerukan 10 sungai, satu kanal, dan empat waduk yang sedianya dapat dilakukan pada 2011 ternyata ditunda menjadi Maret 2012 karena payung hukum dari pemerintah pusat baru keluar.

Padahal pengerukan sungai atau Jakarta Emergency Dradging Iniatif (JEDI) sudah diprogramkan sejak 2009. "Saya selalu berharap pelaksanaan JEDI bisa dilakukan sejak tahun 2009, tapi selalu mengalami kendala karena peraturan pemerintah yang lambat keluar. Jika pengerukannya dilakukan Maret 2012, berarti itu bukan untuk antisipasi banjir tahun ini," kata dia, Rabu (23/11).

Gubernur mengatakan 10 sungai yang akan dikeruk tersebut saat ini sudah sangat dangkal dan menyempit. Sungai-sungai itu belum pernah dikeruk sejak 30–40 tahun lalu. Kondisi itu diperparah dengan terjadinya penyempitan di badan sungai akibat hunian liar. Kedua persoalan tersebut membuat sungai-sungai itu tidak mampu menampung jumlah air yang berasal dari hujan lokal maupun kiriman. Selain persoalan pengerukan, kata Foke, anggaran untuk pemeliharaan kanal dan waduk dalam APBD sangat minim.

Padahal biaya perawatan kanal untuk pengerukan sampah yang telah menjadi lumpur dan mengendap cukup tinggi. "Dinas PU sudah mengakui anggaran untuk pemeliharaan kanal banjir tidak proposional. Untuk itu, kita akan menempatkan proporsi yang ideal antara maintenance dan pembangunan," ujar dia.

Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Achmad Sanusi mengatakan minimnya anggaran untuk pemeliharaan dikarenakan Dinas PU tidak berani mengambil keputusan untuk menganggarkan pengerukan sungai dan kanal. Dinas PU hanya merekomendasikan anggaran pemeliharaan saluran air sebesar 400 miliar rupiah pada 2012.

Jumlah itu terbilang kecil dibanding anggaran keseluruhan Dinas PU yang mencapai 3,3 triliun rupiah. Anggaran sebesar itu sebagian besar digunakan untuk proyek pembangunan jalan. Kondisi seperti itu sudah berlangsung sejak 2009. Dinas PU tidak pernah menganggarkan pengerukan sungai dan kanal.

### Siagakan Personel

Meski menuai banyak kendala, kata Fauzi Bowo, Pemprov terus melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir besar di Ibu Kota. Salah satunya menggelar apel besar kesiapsiagaan penanggulangan bencana di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI Jakarta, Rabu.

Sebanyak 3.600 personel disiagakan selama 24 jam untuk mengantisipasi bencana. Gubernur mengungkapkan bencana bisa datang kapan dan di mana saja. Oleh karena itu, jalan terbaik yang harus dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Ia menilai sekarang sudah saatnya pola penanggulangan bencana terpadu dirancang ulang.

Menurut dia, hal itu dipandang penting sebagai dasar penentuan kebijakan dan program penanggulangan maupun mitigasi bencana terpadu, terencana, terarah, dan berkesinambungan. Menurut dia, koordinasi merupakan unsur penting dari manajemen penanggulangan bencana.

"Kita perlu mengembangkan kerja sama yang lebih intensif dengan pemerintah daerah sekitar Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Bodetabekjur)," kata dia. Kepala Dinas Damkar dan PB DKI Jakarta Paimin Napitupulu menambahkan Dinas Damkar dan PB telah menyiagakan 3.600 personel di beberapa titik rawan bencana banjir.

"Tujuannya untuk mengantisipasi banjir di musim penghujan 2011 dan 2012 ini." Petugas-petugas tersebut harus siaga di titik rawan banjir selama 24 jam penuh. Langkah itu dilakukan karena bencana banjir di DKI Jakarta bisa datang kapan saja, tidak kenal waktu.